

# MEMAHAMI ETNISITAS DI PERKOTAAN: POLITIK INTER-RUANG DI KOTA MULTIKULTURAL

## UNDERSTANDING ETHNICITY IN THE CITIES: INTER-SPACE POLITICS IN MULTICULTURAL CITIES

Thung Ju Lan

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI

thung\_julan@yahoo.com

### Abstrak

Tulisan ini membahas pemaknaan konsep etnisitas di perkotaan yang berbeda dengan konsep 'kelompok etnik' di perdesaan. Pemaknaan etnisitas di perkotaan, seperti dikatakan Hirschman, tidak terkait dengan sifat asalnya yang primordial, melainkan karena etnisitas menjadi dasar dari organisasi politik dan ekonomi di masa lalu dan masa kini yang dapat diproyeksikan ke masa depan. Perspektif Hirschman menjadi penting untuk memahami dinamika etnisitas di perkotaan yang diterjemahkan dan diartikulasikan melalui "strategi komunikasi dan diferensiasi yang sangat dinamis". Ini juga terkait erat dengan fungsi baru etnisitas sebagai sumber daya bagi proses negosiasi politik di perkotaan untuk membangun—apayang dikatakan Ojeda—sebagai "skenario pengakuan baru oleh negara". Hal itu seperti yang terlihat pada kasus Pilkada 2017 yang sepertinya membelah masyarakat Jakarta atas dasar etnisitas (pribumi Islam-non-pribumi non-Islam).

**Kata kunci:** etnisitas, perkotaan, politik identitas kota, multikultural

### Abstract

*This article discusses the reinterpretation of urban ethnicity which differs to the concept of ethnic groups introduced by classical anthropologists. Urban ethnicity, as Hirschman suggested, could be defined as the foundation of economic and political organizations in the past and present which might be projected to the future. It is totally unrelated to its primordial characteristics. Hirschman's perspective becomes significant to understand the dynamics of urban ethnicity which has been interpreted or articulated through "highly dynamic communication and differentiation strategies". This perspective of ethnicity works as a resource for political negotiation process in urban life to build—what Ojeda called—"new recognition scenario by the state". The case of 2017 Regional Election of Jakarta Governor-Vice Governor—which is seen as dividing Jakarta people into indigenous Muslims and non-indigenous non-Muslims—might provide an interesting example of how to construe urban ethnicity in the present context.*

**Keywords:** ethnicity, urban politics, multicultural city

### Pendahuluan

Di tahun 1984, Charles Hirschman telah menulis tentang etnisitas yang akan terus menjadi kekuatan yang signifikan di Asia Tenggara, bukan karena sifatnya yang primordial melainkan karena etnisitas menjadi dasar dari organisasi politik dan ekonomi di masa lalu dan masa kini (Hirschman, 1984:114). Menurutnya, kemerdekaan tidak menghapuskan proses ini, tetapi bahkan menciptakan arena baru untuk mobilisasi berdasarkan garis etnis, walaupun, pada waktu yang sama, perubahan-perubahan lainnya telah mengurangi lingkup polarisasi etnis (Hirschman, 1984:114).

Ia juga berpendapat bahwa ideologi rasisme tidak mati, karena masih ada sedikit

legitimasi dari institusi-institusi masyarakat yang paling berpengaruh, sementara pergeseran fungsional berdasarkan kelas dan status kian dipaksakan oleh kekuatan modernisasi (Hirschman, 1984:114). Dalam hal ini, etnisitas, seperti dikatakan David Jacobson<sup>1</sup> yang mengacu

---

<sup>1</sup>David Jacobson membuat ulasan buku *Urban Ethnicity* yang diedit oleh Abner Cohen dan dipublikasikan sebagai Association of Social Anthropologists Monograph Series, 12. Buku ini diterbitkan di London oleh Tavistock tahun 1974. Ulasan David Jacobson diambil Wiley Online Library dari *American Anthropologist*, Volume 81, Issue 2, Version of Record Online: 28 Oct. 2009, General and Theoretical, pp. 437-438, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1979.81.2.02a00900/pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2017.

kepada Abner Cohen, diartikan sebagai “*processually and as an idiom by which distinctiveness is articulated in a context of cultural heterogeneity and in terms of which political interests are defended or advanced*” (secara proses dan sebagai suatu ungkapan bahasa yang mengartikulasikan kekhususan dalam konteks keberagaman budaya dan dalam batasan di mana kepentingan politik dipertahankan atau dikembangkan)” (Jacobson, 2009:437).

Oleh karena itu, seperti dijelaskan Jacobson, “*the cultural characteristics chosen as diacritical need not reflect traditional customs: they need only be different from others in the same situation*” (karakteristik kultural yang dipilih untuk kekhasan/kekhususan tidak harus merefleksikan kebiasaan-kebiasaan tradisional, melainkan hanya perlu berbeda dengan yang lain dalam situasi yang sama)” (Jacobson, 2009:438). Pandangan Hirschman, Jacobson, dan Cohen ini menjadi penting untuk memahami mengapa masyarakat kota Jakarta, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang terbuka dan maju, pada pilkada 2017 yang baru lalu terbelah atas dasar etnisitas (pribumi Islam vs non-pribumi non-Islam).

Lebih lanjut, seperti dikatakan Jacobson, etnisitas muncul sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial dalam dua macam keadaan. Pertama, konflik antargrup dalam *setting* lokal. Kedua, solidaritas intragrup dan jaringan kerja sama etnik yang dikembangkan antarlokasi (perkotaan dan pedesaan) (Jacobson, 2009:438). Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua bisa kita temukan di Jakarta. Menarik untuk dicatat bahwa di daerah yang penduduknya sedikit dan cukup lahan, di antara para imigran yang datang ke daerah itu, kelompok-kelompok etnik yang berbeda tidak saling berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang langka, walaupun mereka tetap memperlihatkan kekhususan budaya masing-masing.

Hal itu tidak dikarenakan adanya konflik, melainkan untuk mempertahankan ikatan dengan daerah lain, tepatnya dengan anggota kelompok atau komunitas suku yang sama di daerah asal mereka. Barangkali para pedagang Lamongan, atau para perantau Bugis bisa dikategorikan sebagai kelompok ini (kelompok kedua). Dengan kata lain, etnisitas di sini merupakan ungkapan bahasa untuk “solidaritas ekstra-lokal” (Jacobson, 2009:438). Dalam hal ini, mereka mengklaim

kepentingan bukan di daerah tujuan mereka bermigrasi melainkan di daerah asalnya.

Ini berbeda dengan yang pertama yang bersifat *local divisiveness* atau “pembelahan lokal” (Jacobson, 2009:438). Untuk kelompok pertama ini, biasanya elit-elit baru, kepentingan kelompok berada di tempat di mana mereka bermigrasi. Kelompok ini berusaha melepaskan diri dari kelompok atau komunitas suku di daerah asalnya dan mengembangkan basis perkotaan melalui pekerjaan dan pendapatan mereka tanpa menekankan identitas etnik [asal] baik secara kognitif maupun tingkah laku (Jacobson, 2009:438).

Dengan demikian, *urban ethnicity* atau etnisitas di perkotaan yang dimaksud Cohen dan Jacobson adalah etnisitas yang ditunjukkan oleh mereka yang masih mempunyai ikatan pedesaan ke daerah asal, sehingga unit deskripsi atau analisis terhadap tingkah laku mereka tidak lagi terbatas pada *setting* lokal tempat mereka hidup dan bekerja, melainkan pada konteks yang lebih luas secara regional maupun nasional yang mempengaruhi tindakan mereka (Jacobson, 2009:438).

Akan tetapi, jika kita memperhatikan konsep etnisitas Mitchell dalam Cohen yang dipaparkan oleh Jacobson, tampak bahwa studi etnisitas tidak berhenti pada kelompok-kelompok etnik dan/atau pengelompokan atas dasar etnik. Menurut Mitchell, ada dua konsep etnisitas, yaitu “*a structural concept, which is the analyst’s abstraction of the attributes of actors used to explain their behavior, and a cultural concept in terms of which actors themselves may order and interpret their experiences*” (konsep struktural yang merupakan abstraksi analisis tentang atribut-atribut aktor untuk menjelaskan tingkah laku mereka, dan konsep kultural dalam arti aktor-aktor sendiri dapat menyusun dan menterjemahkan pengalaman-pengalaman mereka)” (Jacobson, 2009:438). Pembedaan semacam itu kemudian memunculkan pertanyaan tentang arti etnisitas itu sendiri bagi para aktor.

Seperti dikemukakan Schildkrout yang dipaparkan oleh Jacobson, bagi para migran di perkotaan yang jaringan kekerabatannya tidak lengkap dan bersifat sementara, *kinship* atau hubungan kekerabatan, misalnya, menawarkan ungkapan bahasa yang bisa menggambarkan hubungan kerja sama antaretnik. Selain itu, hubungan kekerabatan yang fiktif tersebut memberikan rasa keberlanjutan secara ideologis

dengan kualitas hubungan kekerabatan yang tahan lama (Jacobson, 2009:438). Dengan kata lain, metafor hubungan kekerabatan/etnisitas membantu individu-individu migran di kota untuk menata kembali kehidupan mereka dan menghubungkan masa lalu mereka dengan masa depan. Artinya, di perkotaan juga dapat kita temukan konstruksi jaringan etnisitas 'baru' yang dibentuk oleh mereka yang berasal dari kelompok-kelompok etnis yang berbeda, akan tetapi secara ideal mempunyai karakteristik seperti etnisitas. Contoh yang paling jelas dari hal tersebut adalah kelompok-kelompok pekerja di satu perusahaan yang sudah merasa seperti satu keluarga ketika menghadapi ancaman dari luar. Komunitas preman, pemulung, pengamen, dan ojek pun bisa dikategorikan sebagai etnisitas ketika mereka berhadapan dengan komunitas non-preman, non-pemulung, non-pengamen, atau non-ojek.

Secara umum kajian tentang etnisitas di perkotaan Indonesia masih sangat jarang. Salah satu di antaranya adalah tulisan Hendro Prabowo dan Agus Suparman yang berjudul "Masalah Etnisitas dan Tata Ruang di Indonesia", yang diterbitkan sebagai bagian *Proceeding* Seminar Nasional PESAT 2005 (Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005; ISSN: 18582559). Untuk tiga sampel wilayah yang diteliti (Jakarta, Medan, dan Lampung), Prabowo dan Suparman secara umum menyimpulkan bahwa "masalah etnisitas bermotif ekonomi sangat kuat dan berpengaruh terhadap tata ruang", dan bahwa semakin besar sebuah kota, semakin banyak pula jumlah kelompok etnis yang ada di kota tersebut, akan tetapi "pola-pola *cluster* semakin bergeser pada heterogenitas". Sayangnya tidak ada rincian yang jelas tentang hal-hal yang disimpulkan mereka ini, karena etnisitas di sini hanya dipergunakan sebagai "penanda" kelompok-kelompok dalam populasi di wilayah-wilayah yang diteliti, yang oleh kedua peneliti tersebut dibedakan antara pendatang dan penduduk asli. Atas dasar itu, penting untuk mendiskusikan konsep *urban ethnicity* atau etnisitas di perkotaan sebagai *urban politics* atau politik di perkotaan, karena seperti yang bisa kita lihat baru-baru ini, etnisitas menjadi sebuah isu politik yang menonjol, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

### **Etnisitas dan Modernisasi di Ruang Perkotaan**

Secara sosiologis, menurut Robert H. Bates (1999:6), modernisasi mengacu pada

pertumbuhan pendidikan dan munculnya kota-kota. Sementara itu, secara ekonomis, ia mengacu pada meningkatnya taraf pendapatan per kapita. Untuk itu dibutuhkan input kapital, atau lebih tepatnya investasi, pada manusia yang di negara-negara berkembang biasanya terjadi di dalam keluarga. Etnisitas sebagai bentuk yang lebih luas dari kelompok-kelompok kekerabatan, karena merupakan gabungan dari keluarga-keluarga yang mempunyai asal-usul dan leluhur yang sama, "memberikan kontrak (transfer sumber daya) antargenerasi yang secara implisit terpercaya sehingga memungkinkan keluarga-keluarga dalam satu etnik menjadi instrumen untuk membentuk modal manusia dan sebagai agen modernisasi di masyarakat" (Bates, 1999:6-7).

Seperti dijelaskan oleh Bates, walaupun berbasis di pedesaan, kelompok-kelompok etnik seringkali diorganisasikan oleh orang-orang di kota, yaitu anggota-anggota elit yang menemukan dirinya berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pasar ketenagakerjaan di kota. Mereka berupaya mengubah ekspektasi dan pola remunerasi di pasar tenaga kerja dengan mengkonstruksi pandangan tentang "diskriminasi" melalui apa yang oleh David Abernethy disebut sebagai "misionaris etnik", yang tugasnya adalah menyusun strategi agar anggota-anggota etnik mereka di pedesaan sadar akan potensi persatuan mereka dalam berkompetisi dengan saingan mereka (Bates, 1999:15-16). Dengan demikian, sejak pembentukannya, kelompok etnik bersifat politik, dan elit-elitnya di perkotaan selalu berupaya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pada tingkat nasional sambil memastikan dukungan anggota-anggotanya di pedesaan (Bates, 1999:22).

Dalam hal ini, faktor yang terpenting adalah informasi, yang bila dikuasai oleh etnik tertentu akan menimbulkan spesialisasi pekerjaan atas dasar etnis, dan dogma keahlian berbasis etnik seperti yang dicontohkan oleh Horowitz tentang penambang dan pedagang Cina, pengumpul karet India, pekerja kereta api Srilangka, dst (Bates, 1999:17-18). Kondisi di pasar tenaga kerja ini menghubungkan kepentingan elit di perkotaan dengan kolektif di pedesaan. Dengan kata lain, kelompok etnik muncul sebagai sebuah aliansi antara mereka yang tinggal di perkotaan dan mereka yang tinggal di pedesaan, walaupun pada dasarnya di antara mereka pun ada konflik kepemimpinan antara yang 'modern' dan yang 'tradisional' (Bates, 1999: 21-22).

Paparan di atas memperlihatkan *urban ethnicity* sebagai bentuk kontemporer dari membangun identitas dan *sense of belonging* yang dilakukan dengan strategi komunikasi dan diferensiasi yang sangat dinamis (Ojeda, 2009: V), untuk tujuan menangani konteks hari ini dan/atau untuk membayangkan proyek kolektif di masa depan (Ojeda, 2009:3). Oleh karena itu, menurut Ojeda, etnisifikasi kota adalah suatu kecenderungan global. Akan tetapi, ia juga menekankan bahwa kota sendiri bukan hanya latar belakang dari proses tersebut, melainkan juga memainkan peran yang mendasar karena setiap ruang perkotaan mempunyai “aturan” sendiri yang menstrukturkan cara penghuninya berhubungan satu sama lain (Ojeda, 2009: 3). Bahkan, bagi Ojeda, “*urbanity is currently a hegemonic way of organizing social life* (urbanitas saat ini merupakan suatu cara hegemonik untuk mengorganisasikan kehidupan sosial)” (Ojeda, 2009: 3).

Jika dulu pengakuan diri dan asal-usul yang sama merupakan fondasi internal untuk mendefinisikan kelompok etnik, akhir-akhir ini, menurut Ojeda, telah berkembang pandangan yang lebih luas tentang fenomena eksternal yang bekerja secara bersama-sama untuk menentukan batas-batas sebuah kelompok etnik. Dimensi eksternal ini terdiri dari institusi-institusi negara, organisasi-organisasi etnik, partai politik, gereja, atau ilmuwan sosial yang menemukan kategori diferensiasi memakai sensus, undang-undang khusus, riset, dst.

Selanjutnya, seperti dikatakan oleh Ojeda, elemen internal dan eksternal tersebut terlibat dalam hubungan yang dialektikal dalam proses mengkonstruksi perbedaan (Ojeda, 2009:12). Contoh yang diberikannya adalah kondisi masyarakat Chile setelah keluarnya Undang-undang Penduduk Asli Tahun 1993 yang dikenal sebagai 19,253. Pengaruh dimensi institutional dengan diterbitkannya undang-undang tersebut terhadap perkembangan kesadaran etnik, oleh Ojeda dinamakan “*ethno-genesis processes*” atau re-etnifikasi populasi yang terjadi ketika beberapa komunitas mulai mengadopsi kategori-kategori sosial tertentu, seperti Indian, petani, dan *Atacameño* agar menjadi bagian kelompok etnik Likan Antay, sebagai salah satu penduduk asli. Di sini etnisitas menjadi “*a resource of political negotiation that allows building new scenarios of recognition by the state* (sumber negosiasi politik yang memungkinkan membangun

skenario pengakuan baru oleh negara)” (Ojeda, 2009: 13).

Etnisitas komunitas Betawi dalam bentuk Rembug Betawi barangkali tidak akan muncul sebagai alat negosiasi politik jika Jakarta hanya dihuni oleh kelompok etnis Betawi. Dalam hal ini, penting untuk menggaris-bawahi kenyataan bahwa *urban* atau perkotaan dalam tradisi yang panjang didefinisikan sebagai “*places of difference*” atau tempat perbedaan, yaitu ruang tempat ketika beragam subjek dan kolektif bertemu dan hidup berdampingan. Selain itu, penting pula untuk memahami “*Urban*” sebagai suatu proses ketika yang tidak dikenal menjadi dikenal, ketika tiadanya kepercayaan menjadi adanya kepercayaan, serta dari yang asing menjadi yang *familiar* (Ojeda, 2009:209), menjadikan diri seseorang menjadi salah satu penghuni kota (Ojeda, 2009: 210).

Bagaimana mengidentifikasi etnisitas di kota/perkotaan sebagai “identitas dan *sense of belonging*” yang dibangun melalui “strategi komunikasi dan diferensiasi yang sangat dinamis”? Tempat-tempat yang memperlihatkan adanya pemberlakuan etnisifikasi umumnya tidak terlihat oleh penghuni kota yang lain, karena berupa poin-poin komunikasi fisik atau virtual yang bersifat *diffuse* atau membara (Ojeda, 2009: 218). Seperti dikemukakan oleh Ojeda, kelompok etnis tidak menteritorialisasi etnisitas mereka di kota, melainkan membangun poin-poin diferensiasi, yaitu tempat ketika proses perbedaan komunikasi yang permanen dibangun (Ojeda, 2009: 218), sebagai bagian dari sistem identitas yang diakui oleh para anggotanya di antara mereka sendiri. Akar etnik tersebut muncul dalam situasi kehidupan sosial tertentu dan terkait dengan tradisi yang lain, misalnya tukang roti terkait dengan asosiasi perdagangan, praktik kesehatan tradisional terkait dengan sistem kesehatan negara, generasi muda generasi kedua migran terkait dengan kebudayaan pop global, dst (Ojeda, 2009: 218-219).

Dalam hal ini etnisitas mempunyai nilai dan fungsi yang berbeda-beda. Bagi tukang roti, etnisitas adalah sumber kekuasaan; bagi praktisi kesehatan tradisional, etnisitas adalah cara untuk mendapatkan pengakuan; sedangkan bagi generasi muda migran kedua, etnisitas merupakan sumber untuk membangun identitas orang muda yang unik di kota (Ojeda, 2009:218-219). Kembali pada contoh pedagang Lamongan, sepertinya etnisitas bagi mereka menjadi sumber untuk

membangun jejaring ekonomi pasar yang kompetitif.

Walau mereka yang melakukan studi pembangunan percaya bahwa modernisasi akan mengakhiri etnisitas, karena melalui pendidikan, nasionalisme akan menggantikan identitas politik kelompok etnis yang tidak kosmopolitan itu, dan melalui pertumbuhan pasar dan peningkatan pendapatan per kapita, kepentingan kelas akan menggantikan identifikasi etnis, akan tetapi banyak fakta tidak sejalan dengan harapan tersebut. Tampaknya, alih-alih memperlemah etnisitas, modernisasi malah memperkuat etnisitas, seperti kasus Goodwin Lewanika, pendiri dan pemimpin Asosiasi Staf di Rhodesia Utara (sekarang Zambia). Sebagaimana dipaparkan Robert H. Bates, Lewanika yang berpendidikan tinggi, bekerja di perkotaan dan pemimpin asosiasi tersebut bisa dianggap sebagai anggota elit modern. Namun, tahun 1960-an ia memilih untuk berhenti dari posisinya di Asosiasi Staf dan menjadi raja di kerajaan Lozi yang memilih mempertahankan kesukuannya di tengah gerakan nasionalisme. Kasus Lewanika memperlihatkan bahwa memiliki atribut modern tidak berarti hilangnya loyalitas etnis. Di sini Lewanika tidak mempertentangkan etnisitas dengan modernitas, melainkan menjadikannya komplementari (Bates, 1999:5).

### Etnisitas dalam Politik di Perkotaan

Bagi Robert H. Bates, etnisitas adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mempromosikan kekuatan modernisasi, atau dengan kata lain, ia membentuk modal sosial. Namun, di sisi lain, kelompok etnis secara politik berorganisasi, kadangkala mereka terlibat tindakan kekerasan, menghancurkan harta benda, dan menolak pembentukan modal (Bates, 1999:2). Artinya etnisitas bisa menghasilkan manfaat dan juga kerugian bagi masyarakat. Meskipun demikian, politik etnik adalah politik yang biasa di dunia modern, sehingga, menurut Bates, etnisitas tidak perlu ditakuti (Bates, 1999:2).

Dalam pandangan Bates, etnisitas terhubung dengan munculnya dan berkembangnya komunitas-komunitas di seluruh bagian dunia, tempat etnisitas membentuk relasi politik di seluruh pusat perkotaan utama, termasuk di Shanghai, Manchester, dan New York yang sudah bertransformasi menjadi dunia kontemporer (Bates, 1999:25). Menurut Bates, ketika politik

etnisitas sangat meresap dan menyebar, tetapi kekerasan politik tidak menyebar, maka politik etnisitas tentu saja tidak mendatangkan bahaya sebesar yang diperkirakan terkait dengannya (Bates, 1999:25).

Dengan menggunakan data dari 46 negara Afrika pada periode 1970 sampai dengan 1995 yang mencakup tidak hanya informasi tentang ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga tentang jumlah dan distribusi kelompok etnik, diversitas linguistik, dan data keberadaan atau ketidakberadaan etnik minoritas yang terancam yang disusun oleh Ted Gurr dan timnya, serta jumlah kerusuhan dan demonstrasi dan jumlah revolusi dan pembunuhan yang diteliti Arthur Banks untuk mengukur protes politik dan kekerasan politik (Bates, 1999:26). Hasil penelitian Bates menunjukkan bahwa etnik minoritas bisa terancam, ketegangan antaretnik tinggi, akan tetapi tidak ada kekerasan politik, walaupun memang ketika etnisitas dihubungkan dengan kekerasan secara langsung maka tampak adanya daerah merah atau tanda bahaya (Bates, 1999:27-28). Dalam mengeksplorasi hubungan etnisitas dengan kekerasan ini, Bates menemukan bahwa:

*“Ethnic politics is most volatile, it would appear, when an ethnic bloc may be sufficient in size to permanently exclude others from the exercise of power. The group then stands in a position to privatize the state, as it were. Politics may then be redefined as a redistributive or zero-sum game and become fundamentally conflictual in nature. The remedy would appear to be (1) to avoid strengthening the incentives to exclude and (2) to institutionalize incentives to promote inter-ethnic cooperation (politik etnik paling mudah berubah, tampaknya, ketika blok etnik cukup besar jumlahnya untuk secara permanen menyingkirkan kelompok lain dari kekuasaan. Kelompok itu kemudian mempunyai posisi untuk memprivatisasi negara seperti yang diinginkan. Dalam hal ini politik bisa didefinisikan sebagai redistributif atau permainan yang akhirnya nol, dan sifatnya menjadi sangat berkonflik. Cara mengatasinya sepertinya harus dengan (1) Menghindari memperkuat insentif untuk menyingkirkan kelompok lain, dan (2) Menginstitusionalisasikan insentif untuk mempromosikan kerja sama antar etnik)”* (Bates, 1999: 32).

Terlihat dari penjelasan di atas bahwa ketakutan akan disingkirkan secara permanen ketika suatu kelompok naik dalam yurisdiksialah yang mendorong pemimpin etnik untuk memilih

kekerasan daripada protes sebagai strategi politik (Bates, 1999:33). Barangkali ini juga yang kita lihat dalam pilkada DKI 2017, ketika ada satu kelompok (kelompok agama) yang ketakutan akan disingkirkan oleh kelompok yang lain (kelompok nasionalis-sekuler). Menurut Bates, diversitaslah yang menurunkan konflik, bukan homogenitas. Oleh karena itu, usulnya, “*in ethnically diverse societies, we should seek to avoid the adoption of winner-take-all institutions for the choice of governments* (dalam masyarakat yang secara etnis beragam, kita harus mencoba menghindari pengadopsian institusi-institusi yang bersifat ‘pemenang memperoleh semuanya’ dalam pemilihan pemerintahan)” (Bates, 1999:33). Artinya diperlukan sistem representasi yang proporsional di mana minoritas bisa ikut bernegosiasi dalam membentuk pemerintahan sebagai cara untuk mengurangi ketakutan akan disingkirkan.

Etnisitas di perkotaan (*urban ethnicity*) adalah sebuah konsep lama, akan tetapi belum banyak dikembangkan di Indonesia. Pengertian etnisitas yang berbeda juga perlu diklarifikasi dengan data empirik agar jelas perbedaan yang dimaksud: apakah manajemen keberagaman etnisitas/ras yang ditunjukkan oleh kota-kota besar di dunia akan berbeda secara substansial dengan manajemen keberagaman etnisitas/suku bangsa yang ada di Indonesia, jika secara konseptual permasalahan yang muncul sama saja, yaitu relasi antara ‘tuan rumah/penduduk asli’ dan ‘migran/pendatang/pekerja tamu’?

### **Etnisitas dan Kota Multikultural**

Pengalaman Inggris menunjukkan, seperti dikatakan oleh Ash Amin (2002:2), bahwa isu perbedaan etnis dan penegosiasinya menjadi bagian dari masalah sehari-hari kehidupan perkotaan, bukan dalam kerangka nasional tentang ras dan etnisitas di negara tersebut. Dengan kata lain, yang ditekankan di sini adalah politik kehidupan setempat, atau peranan kontak dan pertukaran sosial yang bersifat mikropublik setempat. Dalam hal ini, contoh-contoh dari beberapa kota besar di dunia yang diteliti Ruth Fincher, Kurt Iveson, Helga Leitner, dan Valerie Preston menjadi sebuah pembelajaran yang menarik untuk dibahas di sini.

London, misalnya, walaupun pemerintah Inggris enggan membicarakan multikulturalisme<sup>2</sup>, keberagaman demografisnya sebagai ‘*a city of super-diversity*’ menyebabkan banyak daerah setingkat kelurahan atau *boroughs* yang membentuk *Greater London Area*<sup>3</sup> dan berupaya untuk memperbaiki akses pelayanan untuk seluruh kelompok etnik dan ras, terutama dalam pemberian subsidi perumahan serta *land use zoning* dan proses perencanaan yang inovatif untuk menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah orang Yahudi (*eruvim*) dan mesjid (Fincher, *et.al.*, 2014: 10).

Sementara itu, Amerika, yang menerapkan asimilasi sebagai praktik resmi di tingkat nasional, menganggap multikulturalisme sebagai tanggung jawab individu dan keluarganya. Akan tetapi, pada tingkat lokal, Kota New York menunjuk Kantor Urusan Imigrasi untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh imigran, antara lain dengan menjamin pelayanan kota diberikan dalam berbagai bahasa dan setiap departemen di pemerintahan kota harus memberikan pelayanan yang menargetkan imigran untuk memfasilitasi pemukiman mereka. Pemerintahan kota juga aktif mempublikasi dan secara finansial mendukung daerah etnis yang didesain untuk menarik turis dan penduduk yang tertarik untuk merayakan keberagaman budaya di restoran dan toko-toko. Program kesempatan kerja yang setara yang diberikan kepada Afrika-Amerika juga menguntungkan pekerja dan wiraswasta kelompok minoritas yang baru datang (Fincher, *et.al.*, 2014: 11-12).

Kondisi di New York ini paralel dengan keadaan di Toronto, walaupun secara nasional berbeda karena Kanada terkenal sebagai negara pertama yang menerapkan kebijakan multikulturalisme (tahun 1971) yang mengizinkan dua bahasa resmi (Inggris dan Prancis). Sayangnya, di Kanada peran pemerintah lokal malah sangat ambigu (atau tanpa mandat resmi). Hal ini menyebabkan ketimpangan dan perlakuan yang berbeda tetap terjadi, terutama di daerah suburban tempat pandangan asimilasi masih dominan dan konflik dalam hal penggunaan lahan untuk acara keagamaan dan retail juga terjadi. Hal ini dikarenakan setiap kota bebas

---

<sup>2</sup>Pemerintahan Blair (Partai Buruh) menekankan institusi keagamaan sebagai alat neoliberalisme dan komunitarian.

<sup>3</sup>*Greater London Area* terdiri atas 32 *boroughs* dan *city corporation*.

menerapkan kebijakan sendiri yang dirasa sesuai (Fincher, *et.al.*, 2014:8-9).

Situasi di Sydney, Amsterdam, dan Berlin berbeda pula. Sydney yang seperti Kanada menerapkan kebijakan multikulturalisme. Hal itu dilakukan dengan dikeluarkannya *Racial Discrimination Act* 1975, pendirian kantor urusan multikultural di tahun 1980-an, pembentukan Dewan Penasehat Multikultural Tingkat Nasional di tahun 1990-an, serta pembuatan kebijakan multikultural yang baru berjudul “*The People of Australia – Australia’s Multicultural Policy*” di tahun 2011. Pemerintah lokal diwajibkan membuat laporan tahunan tentang pelayanan terhadap penduduk dari berbagai latar-belakang budaya dan linguistik dan mengembangkan rencana sosial yang mengintegrasikan pelayanan untuk penduduk asli (*aborigin*) dengan mereka yang berlatar-belakang bahasa bukan Inggris. Perayaan dalam bentuk festival dan peristiwa-peristiwa budaya lain juga disebar-luaskan.

Akan tetapi, hal ini hanya terjadi di wilayah-wilayah dengan populasi migran yang besar, karena di tempat-tempat yang jumlah migrannya sedikit, pemerintah lokal kadang-kadang menekankan aspek sempit dari multikulturalisme, yaitupandangan integrasi dari perspektif asimilasi kepada “*White Australian Norm*”, terutama karena tidak ada bantuan sumber daya (konsultasi, pelatihan, serta keuangan) dari pemerintah nasional, sehingga seperti di Kanada, pemerintah lokal memainkan peranan subordinat dalam menerapkan kebijakan multikulturalisme (Fincher, *et.al.*, 2014: 9-10).

Kasus Amsterdam menarik untuk dilihat. Kota ini menerapkan kebijakan multikulturalisme sampai tahun 1990-an, bahkan dianggap sebagai sebuah model sukses yang mengizinkan sekolah dan pelayanan lain dikelola oleh minoritas, melalui kebijakan minoritasnya yang dicanangkan pada tahun 1979, khususnya untuk pekerja Turki dan Moroko, serta warga koloni Suriname. Akan tetapi, pada tahun 1990-an, kebijakannya berubah drastis akibat adanya tuntutan agar migran dan anak-anaknya berasimilasi.

Sebagai respon terhadap tuntutan tersebut, dikeluarkanlah *Civic Integration Act* yang menekankan tanggung jawab setiap individu migran untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Belanda. Pemerintah pusat sudah menyatakan akan mengakhiri dana pelatihan dan kelas bahasa untuk sejarah dan budaya Belanda yang selama ini diberikan secara gratis kepada

para migran. Pemerintah lokal merupakan aktor kunci dalam mensukseskan integrasi tersebut. Melalui ‘*Big City Policy*’ yang dikeluarkan tahun 1990-an, pemerintah lokal ditugaskan untuk mengurangi konsentrasi kelompok pendapatan rendah yang umumnya merupakan minoritas, melalui pengembangan kembali stok perumahan yang mengabaikan latar-belakang etnik dan ras. Kebijakan ini hanya berhasil sebagian, karena segregasi etnik dan ras pada kenyataannya tidak berkurang (Fincher, *et.al.*, 2014:11).

Di tahun 2010, Kanselor Jerman, Angela Merkel menyatakan bahwa multikulturalisme di Jerman sudah gagal, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa penduduk Jerman tidak homogen dengan adanya pekerja Turki dan keturunannya di kota-kota Jerman. Kota Berlin sendiri, melalui *Neighbourhood Councils*-nya, lebih melibatkan penduduk minoritas yang paling terdidik dan sukses dari daerah-daerah yang kurang beruntung daripada perwakilan sektor publik dan privat di setiap wilayah ketetanggaan sebagaimana dianjurkan dalam program *Socially Integrative City* yang diperkenalkan pemerintah federal, *The Bund*. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah lokal berhasil menciptakan inisiatif yang mempunyai karakteristik inklusif dari program multikultural di mana pun, akan tetapi kebijakan nasional yang cenderung pada integrasi telah membatasinya, terutama melalui kebijakan pendanaan yang tidak mendukung pengembangan kembali daerah-daerah yang kurang beruntung (Fincher, *et.al.*, 2014: 12-13).

Contoh dari ke enam kota besar dunia di atas memperlihatkan bahwa realitas keberagaman demografis sulit diabaikan oleh pemerintah lokal, atau dalam hal ini pemerintahan kota. Walaupun kebijakan nasional tidak mengakui multikulturalisme, pemerintahan kota perlu mengembangkan inisiatif untuk mengelola keberagaman di kotanya, karena fakta memperlihatkan bahwa daerah yang kurang beruntung pada umumnya dihuni oleh kelompok minoritas.

Sayangnya, hasil penelitian Finscher, dkk. juga memperlihatkan bahwa, dalam era neoliberal sekarang ini ketika pasar mendominasi, perencanaan daerah perkotaan lebih dilihat sebagai bagian dari upaya investasi dan pengembangan kembali (*redevelopment*) sehingga lebih terkonsentrasi pada perencanaan fisik seperti pengembangan kembali lingkungan perumahan daripada tujuan-tujuan tradisional

dari perencanaan sosial (Fincher, *et.al.*, 2014:15). Dalam pandangan neoliberal, semua pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk keteraturan dan keharmonisan sosial, terlepas dari “apakah mereka mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan” (Fincher, *et.al.*, 2014:16).

Dengan kata lain, solusi untuk marginalisasi kelompok minoritas lebih berorientasi pasar, sehingga menghasilkan homogenisasi diskursus dan praktik perencanaan (Fincher, *et.al.*, 2014:15), yang dikenal sebagai “*social mix planning*”. Hal ini seperti terlihat pada Singapura sebagai Negara-Kota yang multietnik, tempat kuota dan penyebaran spasial menjadi inti kebijakan multikultural (Fincher, *et.al.*, 2014: 18).

Sejak tahun 1990-an, menurut Fincher, dkk. kebijakan ‘*social mix*’ terdiversifikasi menjadi revitalisasi lingkungan ketetanggaan melalui strukturisasi perumahan—seperti diversifikasi sewa-menyewa, *mixed-income development* yang juga dikenal dengan istilah gentrifikasi, *in situ upgrading*—dan perbaikan infrastruktur dan ruang publik untuk menciptakan program dan ruang yang memfasilitasi pertemuan individual pada skala interpersonal. Perubahan ini bisa dilihat dalam konteks urgensi politik yang diperbaharui terkait migrasi dan segregasi (Fincher, *et.al.*, 2014:18).

Terlepas dari argumentasi teoritis bahwa *social mix* dapat meningkatkan inklusi sosial dan mobilitas sosial, mengurangi kemiskinan, memperkuat kohesi sosial, serta sebagai revitalisasi perkotaan, pendekatan *social mix* mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, adanya kesalahan asumsi yang mendasar pada pendekatan ini tentang ‘efek negatif’ dari konsentrasi/segregasi etnik dan ras. Kedua, pendekatan ini menekankan pada program-program yang menangani gejala daripada penyebab kemiskinan dan segregasi. Ketiga, fokus pendekatan ini pada area ketetanggaan dalam melakukan intervensi telah membatasi/menafikan kenyataan tentang kehidupan yang lintas banyak ruang. Keempat, kurangnya perhatian pada ruang si kaya atau kelompok dominan telah menempatkan beban integrasi pada si miskin dan kelompok minoritas (Fincher, *et.al.*, 2014: 22-24).

Hasil studi Fincher, dkk. menunjukkan bahwa, walaupun perencanaan merupakan salah satu upaya strategis pada tingkat lokal untuk membuat kota menjadi tempat yang lebih baik,

peran yang tepat dari para perencana yang menaruh perhatian pada regenerasi dan kebaikan kota tidak selalu jelas (Fincher, *et.al.*, 2014:34). Bahkan, Fincher, dkk. melihat perencana daerah perkotaan sebagai “protagonis kunci” yang selalu dicoba untuk dipengaruhi oleh yang pro dan kontra agar memberikan izin pembangunan, misalnya, tempat ibadah, atau izin lokasi pedagang jalanan. Oleh karena itu, bagi Fincher, dkk. sangat penting untuk mengakui implikasi dari kebijakan perencanaan bagi segmen-segmen penduduk yang berbeda sebagai bagian dari tugas “perencanaan multikultural” (Fincher, *et.al.*, 2014:47).

Dengan kata lain, memahami kota dalam berbagai lokasi dan berbagai hal multikultural merupakan sesuatu yang mendasar dalam praktik perencanaan, karena menurut Fincher, dkk, perencanaan daerah perkotaan dan pemerintahan di kota-kota multikultural bukan, dan tidak boleh, menjadi hak satu-satunya perencana-perencana profesional, melainkan juga harus melibatkan perwakilan dari institusi-institusi publik dan privat, atau organisasi-organisasi komunitas sebagai sebuah aliansi (Fincher, *et.al.*, 2014:47). Akan tetapi, seperti ditekankan oleh Fincher, dkk, rasisme paling baik ditangani oleh perencana yang cukup kuat untuk melakukan intervensi dalam pembentukan tempat dan kebijakan (Fincher, *et.al.*, 2014:47).

Untuk Indonesia, khususnya kota Jakarta, membicarakan etnisitas, jelas bukan mengacu pada etnisitas dan ras yang dikenal di kota-kota dunia di atas, walaupun di kota Jakarta juga kita melihat hadirnya ras yang berbeda, termasuk Eropa dan Afrika. Namun demikian, membahas etnisitas dalam definisi suku bangsa sebagaimana yang dikenal di Indonesia pun, kita tetap harus berbicara tentang Jakarta sebagai kota multikultural, karena dalam hal ini kita membicarakan tentang segmen-segmen penduduk kota Jakarta yang berbeda-beda, baik perbedaan itu atas dasar etnisitas/suku bangsa, agama, ataupun perbedaan-perbedaan lain. Artinya, pengalaman-pengalaman kota-kota dunia tersebut juga bisa menjadi pembelajaran yang positif dalam mengelola keberagaman di kota Jakarta.

Pada dasarnya tidak cukup berbicara tentang pendekatan *social mix* yang difokuskan pada pengembangan fisik lingkungan perumahan. Kita perlu juga mempertanyakan dan/atau memperhatikan “bagaimana penduduk setempat dan gerakan sosial mengimajinasikan dan



mengkonstruksikan ruang ketetangaan dan komunitas yang ko-eksisten” untuk membentuk –apayang oleh Fincher, dkk disebut sebagai– “*theco-construction of everyday multiculturalisms*”, sebagai tugas bersama penghuni kota dan para perencana (Fincher, *et.al.*, 2014: 47).

### **Pilkada Jakarta 2017 dan Jakarta sebagai Kota Multikultural**

Berkaitan dengan pembelahan atas dasar etnisitas (dan agama) yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2017, jika kita memakai perspektif Hirschman, Cohen, dan Jacobson, maka pembelahan itu tidak bisa dilihat sebagai konsekuensi pertarungan politik semata. Pada dasarnya, perkembangan kota Jakarta dari Batavia pada masa kolonial sebagai kota multikultural, dan selanjutnya pada masa kemerdekaan menjadi ibukota Negara Republik Indonesia, dan pada masa Orde Baru sebagai ‘kota metropolitan’, telah menempatkan kelompok- kelompok etnis yang tinggal di Jakarta dalam pola hubungan yang berubah secara dinamis. Kelompok-kelompok etnis yang hidup berdampingan tetapi tersegregasi dalam lingkungan masing-masing (Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Ambon, Pecinan, Kampung Arab. dll.) di era kemerdekaan mulai terintegrasikan menjadi warganegara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Kemudian, perlahan-lahan segregasi tersebut menghilang dan muncullah lingkungan-lingkungan yang membaur, tempat yang warganya berasal dari berbagai latar belakang etnis yang berbeda. Sebagai gantinya, terjadi konsentrasi pemukiman berdasarkan kelas, misalnya antara daerah selatan (Kebayoran) yang dihuni kelas atas, dengan daerah timur (Kampung Melayu dan Tanjung Priok) yang dihuni oleh kelas bawah dan pendatang. Pembagian atas kelas ini semakin nyata ketika di masa Orde Baru Jakarta menjadi kota metropolitan. Muncul pemukiman-pemukiman elit seperti daerah Permata Hijau, daerah Menteng, dsb., ditambah dengan kota-kota satelit yang bertumbuh di pinggiran Jakarta, seperti Bumi Serpong Damai, Lippo Karawaci, dll.

Pecinan Glodok, yang mulai kumuh dan ditinggalkan oleh penghuni lamanya, kemudian berganti penghuni yang berasal dari pendatang miskin dari luar Jawa pada tahun 1980-an. Penghuni awal Pecinan Glodok tersebut berpindah ke daerah Kelapa Gading yang semakin lama semakin tampak mentereng karena menampung

kelas atas dan menengah etnis Tionghoa, khususnya para migran dari luar Jawa.

Sejak tahun 1990-an, sejalan dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan *real-estate* dan periklanan, segregasi etnis yang mulai menghilang dimunculkan kembali melalui proyek-proyek pemukiman yang ‘secara tidak langsung’ mengusung perbedaan kelas, terutama ketika dihadapkan dengan perumahan BTN, yaitu ‘rumah murah’ yang diperoleh melalui kredit pemilikan, sebuah program kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat yang memberikan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit.

Era reformasi pasca Peristiwa Tragedi Mei 1998 yang memotivasi etnis Tionghoa untuk terjun ke politik berhasil membawa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke kursi Gubernur pada tahun 2014 menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Segregasi etnis dan kelas yang menjadi ciri kota Jakarta sejak kemerdekaan–danbelum pernah diupayakan untuk dihapuskan–padaakhirnya menjadi sumber isu untuk mobilisasi politik yang siap dipergunakan untuk Pilkada Jakarta 2017. Jelas bahwa pengorganisasian sebuah kota berdampak besar terhadap proses negosiasi politik untuk “mendapatkan pengakuan Negara” sebagaimana dikatakan oleh Ojeda di atas. Terlebih karena Jakarta sebagai ibukota Indonesia, dan sebagai kota terbesar di Indonesia yang menjadi tujuan setiap individu untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya, menjadi tempat berbagai perbedaan bertemu dan bernegosiasi untuk mendapatkan pengakuan negara.

Pilkada Jakarta 2017, berbeda dengan pilkada sebelumnya, terfokus pada kota Jakarta seperti apa yang akan dibangun untuk masa depan. Tidak mengherankan jika isu etnisitas yang diangkat adalah pribumi versus non-pribumi, karena sudah sejak kemerdekaan isu tersebut diidentikkan dengan golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat melalui Politik Benteng tahun 1950-an<sup>4</sup>. Basuki Tjahaja

---

<sup>4</sup>Tentang Kebijakan Politik Benteng ini, lihat Anonim, “Kebijakan Ekonomi, Program Benteng Tahun 1950-1957”, Bab IV, hal. 63-98, Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, tanpa tahun. Diunduh dari [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_ps\\_022903\\_chapter4\(1\).pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ps_022903_chapter4(1).pdf) pada 4 Januari 2018.

Purnama yang berasal dari etnis Tionghoa “tidak dipercaya” akan membantu kelompok pribumi yang secara ekonomi lemah, walaupun banyak program-program yang diakui oleh beberapa kalangan telah berpihak pada kelas bawah. Pelabelan “pribumi – Islam” dan “non-pribumi – non-Islam”, di sisi lain bisa dikaitkan dengan fenomena global, Peristiwa Pemboman World Trade Center pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang menstigma kelompok Islam sebagai kelompok teroris<sup>5</sup>. Kebangkitan Islam yang terjadi setelah peristiwa tersebut menjadikan Islam sebuah “identitas perlawanan” kaum tertindas.

Hal yang penting untuk digaris-bawahi di sini adalah pengorganisasian Jakarta sebagai sebuah kota yang diharapkan bersifat multikultural. Pilkada 2017 memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota yang sesungguhnya ‘tidak multikultural’, karena ada segregasi etnis dan kelas yang sudah berakar dalam, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan kajian tentang masyarakat Jakarta yang serius dan difokuskan pada persoalan etnisitas dan etnisifikasi ruang kota yang terjadi di Jakarta agar kita bisa menemukan manajemen keberagaman seperti apa yang tepat bagi Jakarta di masa depan.

## Kesimpulan

Perspektif Hirschman, Cohen, dan Jacobson tentang etnisitas di perkotaan membuka wawasan kita tentang pentingnya melihat kajian etnisitas di perkotaan sebagai sesuatu yang berbeda dengan kajian etnisitas di perdesaan. Hal itu karena struktur kota mengatur pola hubungan antarkelompok secara berbeda dengan pola hubungan di perdesaan. Oleh karena itu, etnifikasi ruang kota menjadi sesuatu yang sangat dinamis, terutama jika mengingat populasi kota selalu berubah dengan adanya arus urbanisasi dari perdesaan.

Kajian tentang etnisitas di perkotaan perlu dilihat sebagai “prinsip dasar dari organisasi sosial dalam dua macam keadaan” sebagaimana diperkenalkan oleh Jacobson di

atas, yaitu pertama, konflik antar-grup dalam seting lokal, dan kedua, solidaritas intragrup dan jaringan kerja sama etnik yang dikembangkan antar-lokasi (perkotaan dan perdesaan). Barangkali, melalui kajian atas dua hal ini, kita bisa memahami mengapa Pilkada Jakarta 2017 membelah masyarakat Jakarta dan pembelahan seperti apa pula yang sesungguhnya terjadi jika dikaitkan dengan Jakarta sebagai sebuah ruang kehidupan, sekaligus ruang perbedaan.

## Daftar Pustaka

- Amin, Ash. (2002). “Ethnicity and the Multicultural City: Living with Diversity”. Report for the Department of Transport, Local Government and the Regions and the ESRC Cities Initiative. Diunduh dari <https://pdfs.semanticscholar.org/7e55/df-d8faa32dc221f3c41b37bb5bfb2c710031.pdf> pada 2 Agustus 2017.
- Anonim. n.d. “Kebijakan Ekonomi, Program Benteng Tahun 1950-1957”. Bab IV, hal. 63-98. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. Diunduh dari [http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_ps\\_022903\\_chapter4\(1\).pdf](http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ps_022903_chapter4(1).pdf) pada 4 Januari 2018.
- Bates, Robert H. (1999). “Ethnicity, Capital Formation and Conflict”. Makalah yang dipresentasikan pada *the festschrift conference for Myron Weiner, Sept 24–26. Kellogg Institute, University of Notre Dame*. Diunduh dari [http://theleder.com/docs/Misc/Bates\\_Ethnicity-Capital-Formation-and-Conflict.pdf](http://theleder.com/docs/Misc/Bates_Ethnicity-Capital-Formation-and-Conflict.pdf) pada 3 Januari 2018.
- Fincher, Ruth. *et.al.* (2014). “Planning in the multicultural city: Celebrating diversity or reinforcing difference?”. Dalam *Progress in Planning* 92 (2014) 1-55 source: <http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2013.04.001>. Diunduh dari <http://faculty.bemidjistate.edu/mlawrence/Fincher.pdf> pada 20 Agustus 2017.
- Hirschman, Charles. (1984). “Ethnic Diversity and Social Change in Southeast Asia”. *Southeast Asian Studies – Options for the Future*, The Wilson Center, March 1984. Diunduh dari <https://faculty.washington.edu/charles/new%20PUBS/A46.pdf> pada 27 Mei 2017.

<sup>5</sup>Tentang kaitan Islam dan pemboman World Trade Center, baca Triwahyuni, Dewi, n.d., “Perubahan kebijakan keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara”. Diunduh dari <https://repository.unikom.ac.id/30659/1/bu-dewi-triwahyuni.pdf> pada 4 Januari 2017.

- Jacobson, David. (2009). "Urban Ethnicity, *Abner Cohen*, ed. (London:Tavistock, 1974)". *American Anthropologist* Volume 81, Issue 2, Version of Record online: 28 OCT 2009, General and Theoretical, hal. 437-438. Diunduh dari <http://online.library.wiley.com/doi/10.1525/aa.1979.81.2.02a00900/pdf> pada 28 Mei 2017.
- Ojeda, Walter Alejandro Imilan. (2009). "Urban Ethnicity in Santiago de Chile: Mapuche Migration and Urban Space". Disertasi Von der Fakultät VI - Planen Bauen Umwelt der Technischen Universität Berlin. Diunduh dari [https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/2479/5/Dokument\\_6.pdf](https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/2479/5/Dokument_6.pdf) pada 29 Mei 2017.
- Prabowo, Hendro dan Agus Suparman. (2005). "Masalah Etnisitas dan Tata Ruang di Indonesia". Dalam *Proceeding Seminar Nasional PESAT 2005* (Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005; ISSN:18582559). Diunduh dari [http://repository.gunadarma.ac.id/635/1/MASALAH%20ETNISITAS%20DAN%20TATA%20RUANG%20DI%20INDONESIA\\_UG.pdf](http://repository.gunadarma.ac.id/635/1/MASALAH%20ETNISITAS%20DAN%20TATA%20RUANG%20DI%20INDONESIA_UG.pdf) pada 29 Mei 2017.
- Triwahyuni, Dewi. n.d. "Perubahan Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara". Diunduh dari <https://repository.unikom.ac.id/30659/1/bu-dewi-triwahyuni.pdf> pada 4 Januari 2017.

